

**ANALISIS PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM MENGEFEKTIFKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA DESA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
UTN Alauddin Makassar**

Oleh:

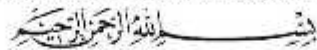
A. IRHAM MAULAN ASIS

Nim:10200114026

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Irham Maulana Asis
Nim : 10200114026
Tempat/Tgl. Lahir : Bontobulaeng, 01 April 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perum. Bumi Sama Permai
Judul : Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
Mengetektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di
tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten
Sinjai)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 04 November 2018

Peneliti

A. Irham Maulana Asis
NIM : 10200114026

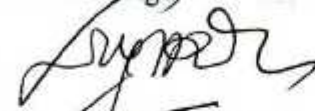
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **A.IRHAM MAULANA ASIS**, NIM: **10200114026**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**ANALISIS PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGEFEKTIFKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi di kantor DPMD kabupaten sinjai)**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang ujian hasil.

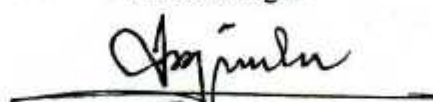
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, November 2018

Pembimbing I


Dr. Dudung Abdullah, M.Ag
NIP.195402031985031002

Pembimbing II


Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D
NIP.197312312005011034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Hukum Islam. (Studi di Kantor DPMD Kab. Sinjai)", yang disusun oleh A. Irfam Maulana Asis, NIM: 10200114026, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 M, bertepatan 14 Rabi'ul-Awwal 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 23 November 2018 M

15 Rabi'ul-Awwal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Kurniati M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Hj. Rahmiati S.Pd, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

KATA PENGANTAR



Assalamuualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbiil Alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini dapat peneliti rampungkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (SI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk kepada orang tua saya **Ayahanda Andi Abd. Asis** dan **Ibunda Andi Fatimahsanti** sebagai motivator terbesar yang tidak hentinya bekerja keras dan berdoa demi kelanjutan studi putranya. Selain itu, juga telah menekankan mengenai pentingnya pendidikan dan menghargai ilmu, memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan juga telah memberikan kepercayaan yang amat besar bagi Peneliti dan salah satu mimpi kalian yang terwujud melihat sang Peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.

Ucapan terima kasih juga peneliti ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si, dan Dr. Kurniati, M.Hi, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Bapak Dr. Dudung Abdullah, M.Ag, dan Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UTN Alauddin Makassar.
6. Terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah membantu Peneliti dalam memperoleh data penelitian.
7. Keluarga besar SMAN 2 Bulukumba, yang memberikan motivasi dan dorongan beserta saran dan kritikan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan 2014 terkhusus HPK A dan teman-teman yang lain yang tidak sempat disebutkan namanya, terima kasih telah memberikan saran dan semangat kepada Peneliti selama ini.
9. Sahabat-sahabatku Alamsyah, Irwin, Irfan, Jusman, Bismar, Sabir, Akbar, Sulliani, Indayanti, Mutmainnah, dan Reski Wahyuni yang selalu memberikan semangat dan setia menemani Peneliti dalam menyelesaikan studinya.
10. Teman teman seperjuangan di KKN Angkatan 58 Kabupaten Sinjai terkhusus kepada teman-teman posko Kecamatan Bulupoddo Desa Lamatti Riaja yaitu Supriadi, Rijal, Aswandi, Qadri, Nurul, Dian, Satifa, Satriani, dan Risda.
11. Terima kasih kepada Guru-guru yang pernah mengajar Peneliti, Skripsi ini adalah bentuk terima kasih dan penghargaan tertinggi penulis atas jasa-jasa para guru selama ini.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian sangat berarti.

Demikian yang dapat Peneliti sampaikan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apa bila dalam penulisan ini terdapat banyak ketidak sempurnaan. Olehnya, penyusun menerima kritik dan saran pembaca sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi di penulisan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 04 November 2018

Peneliti



A. Irham Maulana Asis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-16
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJUAN TEORETIS	16-33
A. Tinjauan Umum Tentang Good Governance	17
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintah Desa	21
C. Realisasi Penggunaan Dana Desa	23
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33-37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36

BAB IV PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGEFEKTIFKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA.....	37-73
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai	38
B. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa	59
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa	64
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa	67
BAB V PENUTUP.....	73-76
A. Kesimpulan	74
B. Implikasi Penelitian	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وُ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (َ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : A. Irham Maulana Asis
Nim : 10200114026
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa, yang *breakdown* menjadi tiga sub masalah yaitu: 1). Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa? 2). Apa faktor pendukung dan penghambat upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa? 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa?.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan teologi normatif (syar'i). Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam mengefektifkan laporan penggunaan dana desa adalah: (a) Taat dengan aturan regulasi dan ketentuan, (b) menyeter kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau progres hasil pelaksanaan kegiatan dan (c) Laporan realisasi dana desa harus diperiksa terlebih dahulu dan (d) Dana desa laporannya tercatat sampai dipusat melalui aplikasi *omspam*. 2). Faktor pendukung upaya DPMD Dalam mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan dana desa yaitu: penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Sedangkan faktor penghambat antara lain: (a) keterlambatan desa dalam menetapkan APBDes, (b) faktor cuaca menjadi kendala, (c) permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa. 3). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya yang Dilakukan Oleh DPMD adalah (a) melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama dan (b) bersikap *siddiq, amanah, fathanah* dan *tabliq*.

Implikasi dari penelitian adalah 1) agar lebih meningkatkan hubungan kerja sama antara DPMD dan pemerintah Desa, dan diharapkan terealisasi pembangunan dana desa yang adil dan merata.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.¹ Sebagaimana amanat undang-undang desa, yang diatur dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat 2 (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara dan alokasi anggaran tersebut bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi anggaran pendapatan belanja negara inilah yang di dalam struktur kelompok transfer pendapatan APBDesa yang disebut dengan dana desa.² Sebagai alokasi desa yang bersifat desentralisasi.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³ Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang mana alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan APBN.

¹ <https://www.suryaden.com-p-43-Tahun-2014-Tentang-Peraturan-Pelaksanaan-UU-Desa>.

²Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta Selatan: PT Wahana Semesta Indonesia, 2016), h. 83.

³Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 83.

Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementrian/badan mengajukan anggaran untuk program yang berbasis dana desa kepada menteri ditetapkan sebagai sumber dana desa. Dalam hal dana telah memenuhi 10% dari total dana transfer ke daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana desa bendahara umum negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴ Hal ini harus sesuai dengan ketentuan dana desa berupa pemenuhan alokasi 10%.

Dalam hal pengalokasian dana desa dilakukan dengan dua tahap yaitu pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota oleh pemerintah pusat dan pengalokasian dana desa setiap desa oleh bupati/walikota. Pengalokasian dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Untuk proses penyalurannya dana desa disalurkan oleh pemerintah dengan cara pemindahan bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara).

Dana yang telah disalurkan melalui bupati/wali kota untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Akan tetapi sebelum proses pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa, dilaksanakan oleh kepala desa, maka terlebih dahulu kepala desa harus membuat dan menyetorkan “Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa” sebagai syarat utama agar dapat menyalurkan dana desa. Ketentuan ini diatur dalam peraturan menteri nomor 50 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa sebelum

⁴Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 83-84.

⁵Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 87.

penyaluran dana desa dilakukan, maka terlebih dahulu harus menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana desa.⁶ Realisasi penggunaan dana desa harus sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang sesuai konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pemeriksaan laporan realisasi penggunaan dana desa pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian penyaluran dan penggunaan dana desa. Penyampaian laporan realisasi tersebut dilakukan oleh bupati yang untuk selanjutnya di sampaikan kepada menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan badan pemerintahan daerah. Sebelum laporan realisasi sampai kepada Bupati. Sebagai tahap awal pemeriksaan laporan realisasi penggunaan dana desa, terlebih dahulu akan diperiksa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sebagai dinas daerah yang kemudian diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. hal ini dimaksudkan agar laporan realisasi yang dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga apabila laporan realisasi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan prosedur, maka untuk selanjutnya Kepala Desa dapat mencairkan atau menyalurkan dana tersebut untuk keperluan pembangunan wilayahnya.⁷ Baik itu keperluan berupa pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai kebutuhan pembangunan desa demi terwujudnya pembangunan yang merata.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib,transparan, dan berkualitas. Pemerintah dan kabupaten kota atau pejabat yang diberi kewenangan yang dalam hal ini adalah dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat

⁶Sutardjo, *Aturan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018*, 03 Januari 2018. <http://pendampingdesa.or.id/aturan-pengelolaan-dana-desa-tahun-2018/>. (diakses pada tanggal 5 Agustus 2018).

⁷Sutardjo, *Aturan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018*, 03 Januari 2018.

mengoptimalkan penyampaian laporan tersebut, agar penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa yang tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Maka desa yang akan menerima bantuan dana desa tidak dapat menerima dan mencairkan dana tersebut.⁸ Sehingga laporan dana desa sangat penting demi terwujudnya pencairan dana desa yang sesuai agar terwujud kesejahteraan masyarakat sebagai hasil realisasi dana desa.

Apabila hal ini terjadi maka desa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa, sanksi pengurangan dana desa dan pemotongan dana desa. Sehingga apabila hal ini terjadi maka akan berdampak pada pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu sebagai badan yang diberikan wewenang untuk mengontrol, mengawasi, dan memeriksa dana desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa harus mengupayakan sedemikian cara agar pelaporan realisasi dana desa dapat diselesaikan tepat waktu oleh kepala desa yang bersangkutan.⁹Oleh karena itu peranan. Dinas pemberdayaan masyarakat desa, merupakan kunci utama agar kepala desa dapat menyalurkan dananya.

Dinas pemberdayaan masyarakat desa sebagai badan yang mendapatkan amanah dalam mengawasi hal tersebut sangat dibutuhkan agar dana desa tidak dipotong atau dibatalkan penyalurannya. Dalam syariah Islam perintah menjalankan amanah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 58 yang berbunyi:

□ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

⁸Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 89.

⁹Sutardjo, *Aturan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018*, 03 Januari 2018.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹⁰

Adanya ketidakmaksimalan dalam laporan sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan dana desa, sehingga Dinas pemberdayaan masyarakat pemerintah desa diharapkan memberikan solusi agar mampu mendorong kepala desa dalam mengumpulkan laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mengenai masalah penyalahgunaan anggaran dana desa menjadi hal yang cukup riskan terjadi sehingga membutuhkan adanya kontrol atau pantauan yang ketat dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau Dari Hukum Islam (studi di kantor DPMD kabupaten sinjai).

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2009), h. 87.

2. Deskripsi fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Analisis Peranan	Tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa.
Laporan Realisasi	Suatu dokumen yang berbentuk laporan mengenai rincian penggunaan dana desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa sebelum mendapatkan penyaluran dana desa.
Hukum Islam	Seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat atau sumber hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

a. Dinas pemberdayaan masyarakat desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah yang mana di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretasis daerah. Dinas pemberdayaan masrakat desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten.

b. Peranan PMD

Peranan PMD dalam kamus besar bahasa Indonesia peranan mempunyai arti tindakana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan PMD adalah tindakan yang dilakukan oleh para aparat pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

c. Laporan Realisasi Dana Desa

Laporan Realisasi Dana Desa adalah suatu dokumen yang berbentuk laporan mengenai rincian penggunaan dana desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa, sebelum mendapatkan penyaluran dana desa, yang artinya laporan ini merupakan syarat agar kepala desa dapat menyalurkan dana desa untuk wilayahnya. Sedangkan dana desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakat atau sumber hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹²

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah ”Bagaimana “Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)”. Berdasarkan pokok masalah tersebut maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa?

¹¹ Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 83.

¹² Marzuki, *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam* (universitas Yogyakarta), h. 8.

D. Kajian Pustaka dan Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan yang telah dilakukan penulis, hingga saat ini belum ada suatu karya ilmiah yang membahas secara detail tentang peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait hal tersebut, adapun kajian yang membahas mengenai peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ataupun yang membahas mengenai dana desa adalah sebagai berikut:

1. Dedy Setiawan, *Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2013-2014*, Berdasarkan Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan bantuan pembangunan desa yang diukur dari perspektif program dalam pengelolaan dana pembangunan desa maka kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan belum bisa dikatakan baik karena belum mampu melakukan pembangunan desa secara merata yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dana untuk pembangunan Desa tersebut.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini tujuan utama yang akan dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa.

¹³Dedy Setiawan, *Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2013-2014*, Department of Public Administration FISIP University of Riau.

2. Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Dan Keuangan Dana Desa*, dalam buku ini membahas tentang pengelolaan keuangan dana desa serta pengaturanya, selain itu buku ini merupakan kajian atas tafsir ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa. dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana tahapan, pengalokasian, dana desa, pengalokasian dana desa disetiap desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan, pemantauan, evaluasi dan sanksi.¹⁴ Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti akan memfokuskan pada bagaimana pola pelaporan realisasi dana desa.
3. Leonardo Lisua Liando, dkk, *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*, dalam penelitian menemukan masalah di laporan pertanggungjawaban bukan pada prosedurnya tetapi pada Aparat Desanya saja dikarenakan dengan adanya mekanisme pelaporan seperti dihasil penelitian yang cukup sulit untuk dipahami berdampak langsung pada perangkat desa dimana Perangkat Desa masih kurang memahami cara pembuatan laporan pertanggungjawaban diakibatkan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perangkat Desa khusus Di Desa Kolongan sendiri selaku objek penelitian yang memiliki masalah dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang sering terlambat pembuatannya di karenakan beberapa hal seperti, (1) Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa umurnya tergolong rendah, (2) Faktor pendidikan dari

¹⁴Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 87.

aparatur pemerintah desa yang ada di tingkat desa tergolong rendah, (3) faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambatnya pengoprasian komputer, (4) kurangnya partisipasi warga Desa Kolongan dalam program pembangunan desa, (5) Banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan, (6) Kurang memahaminya aparat desa mengenai teknis pembuatan pelaporan pertanggungjawaban, (7) Tim pemandu penyusunan atau pendamping desa (PD) untuk memandu aparat desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang hanya ada dua orang di kecamatan kombi, dan (8) Serta hanya ada satu pendamping lokal yang di bawah bimbingan pendamping desa yang ada di kecamatan yang belum optimal dalam pemanduan aparat desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.¹⁵ Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakuka calon peneliti belum dipastikan kendala yang didapatkan dalam memeriksa laporan realisasi dana desa.

4. Muh Nur Akbar, *Analisis Peran badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bulukumba*, dalam penelitian Muh Nur Akbar menjelaskan Analisis Kinerja dan Pelayanan BPMPD, hal ini dilakukan sebagai upaya perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang dan tugasnya, selanjutnya sebagai pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPD, penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba ini diarahkan untuk mendapatkan kinerja yang akurat dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan

¹⁵Leonardo Lisua Liando, *dkk, Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado.

keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi, keekonomian dan efektifitas serta tercapainya tujuan program.¹⁶ Jika penelitian ini menjelaskan secara keseluruhan peranan badan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dalam penelitian yang akan dilakukan calon peneliti hanya pembahasa bagaimana peranan badan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan laporan realisasi dana desa.

5. H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Edisi Revisi), H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, dalam buku ini membahas tentang berbagai persoalan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam fiqih syiasyah untuk menemukan harmonisasi antara *al kulli* (permasalahan global atau universal), dan *Juz I* (parsial), serta menemukan relevansi semangat ajaran dengan kenyataan kehidupan yang konkret serta relevansi antara Maqassid syariah dengan cara-cara akhlaki dibidang syiasah dusturiyah, dawliyah dan maliyah. Dalam penelitoan yang akan dilakukan penulis yang mana pada hasil penelitian nantinya akan membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap peranan badan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektikan laporan realisasi dana desa.
6. Marwan jaffar, dalam bukunya *Perencanaan Pembangunan Desa*. Buku ini membahas tentang perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan BPD dan unsur-unsur masyarakat secara patisipasi guna pemanfaatan dan

¹⁶Muh Nur Akbar, Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bulukumba, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmupolitik, Univeritas Hasanuddin Makassar, 2015.

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pendesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan pengedepankan kebersihan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Serta pemberdayaan masyarakat desa dengan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran. Namun, buku ini tidak menjelaskan tentang peranan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

7. Bambang Trisantono Soemantri dalam bukunya, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan benar. Baik dalam peraturan desa, jenis peraturan desa, mekanisme persiapan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan peraturan selanjutnya mengenai perencanaan pembangunan desa membahas rencana pembangunan jangka menengah desa serta kegiatan dan format penyusunan RPJM- Desa dan RKP desa. Selanjutnya masalah keuangan, administrasi desa, pemilihan kepala desa dan BPD, pelayanan kependudukan serta laporan penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁷ Namun buku ini tidak menjelaskan tentang bagaimana pengembangan hasil pertanian dari desa itu sendiri.
8. Chabib Saleh, dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Desa*. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana mengelola keuangan desa APBDes yang mencakup perencanaan keuangan desa, pengorganisasian keuangan desa,

¹⁷ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 12.

pelaksanaan keuangan desa, penataan usaha keuangan desa, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Desa merupakan daerah otonomi yang bisa menyelenggarakan proses pemerintahannya sendiri karena dana yang masuk ke desa cukup besar maka diperlukan pengelolaan secara rinci dan termanajemen serta pengawasan langsung. Namun buku ini tidak menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, buku ini hanya membahas bagaimana pengelolaan dana desa sedangkan peneliti membahas peranan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan realisasi penggunaan dana desa.

E. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Segi Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi para calon peneliti untuk mengembangkan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan laporan realisasi dana desa.

b. Segi Praktis

Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam memahami upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjaun Umum Tentang Good Governance*

1. *Pengertian (good governance)*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.¹ Dalam konsep *governance* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasalayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.² Sehingga peranan pemerintah menentukan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini *Good Governance* dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negeran dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, tetapi juga peran berbagai actor di luar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.³

Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁴ Dapat dikatakan

¹Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 1.

²Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, h. 1-2.

³Joko widodo, *Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas, control birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*, (Surabaya: insan cendekia, 2001), h. 18.

⁴Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance* h. 5.

bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Istilah “Governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 yang lalu. Tetapi selama itu *Governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara di Indonesia, termonologi “Good governance” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dan ada juga yang mengertikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.⁵

Unsur-unsur utama *governance* menurut Bhatta adalah (1) akuntabilitas (*accountability*) artinya bahwa aparat pemerintah wajib bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam bidang politik, hukum dan keuangan, (2) transparan (*transparency*) yaitu pemerintah transparan terhadap rakyat dalam hal perumusan dan implementasi kebijaksanaan publik, (3) keterbukaan (*openness*) artinya pemerintah harus terbuka dalam hal kritik, tanggapan dan saran dari rakyatnya dan membuka data serta informasi tentang jalannya pemerintahan kepada masyarakat, (4) aturan hukum (*rule of law*) yaitu adanya jaminan kepastian hukum dan rasa

⁵A.Daim, *Hukum Administrasi* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), h.30.

keadilan bagi masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah.⁶

Perbedaan paling pokok antara konsep “*Government*” dan “*Governance*” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, administrasi dalam pengelolaan urusan suatu negara. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya manusia dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Konsep *Governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipasi dan kemitraan. Menurut Sedarmayanti, *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik, baik berupa *Publik Good*, maupun *Publik service* oleh *governance*. Sedangkan praktek terbaiknya disebut *Good governance* yang efektif menurut adanya *Alignment* (koordinasi) yang baik dan berintegritas, profesional serta menerapkan etos kerja dan moral yang tinggi. *Good governance* secara gramatikal mengandung pengertian istilah “*Good*” dalam arti “baik” dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dalam hal ini mengandung dua pemahaman.⁷

Good governance sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Sinergitas antara *good governance* dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak menciptakan

⁶Wempy Banga, *Kajian Administrasi Publik Kontenporer* (Kendari: Unhalu Press, 2011), h. 97.

⁷Daim A, Nuryanto. *Hukum Administrasi Negara* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014). h.43-44.

pemerintahan yang bersih (clean governanc) yang berwibawa. Konsep *good governace* telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Dengan demikian peran perberdayaan masyarakat desa (PMD) sudah sesuai dengan hukum islam.

Konsep *good governance* mempunyai tiga dimensi pokok menurut Mardiasmo, yaitu:

1. *Political governance* yang menyangkut proses pembuatan kebijakan
2. *Economic Governance* adalah proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah penurunan angka kemiskinan, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup.
3. *Administrative Governance* yaitu proses administrasi yang berlangsung dalam wilayah eksekutif dengan mengacu pada sistem implementasi kebijakan.⁹

Adapun karakteristik *good governance* yang dapat dikatakan sebagai prinsip pokok dari *good governance* itu sendiri yang harusnya dijadikan pedoman serta dapat menjadi tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan publik. prinsip pokok *good governance* itu mencakup:¹⁰

1. *Participation* : keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan (langsung/tidak langsung).
2. *Rule of law* : kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi.
3. *Transparancy* : kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengankepentingan masyarakat.

⁸Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pmerintahan Yang Bersih* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008). h.88-89.

⁹Wempy Banga, *Kajian Administrasi Publik Kontenporer*, h. 98.

¹⁰Wempy Banga, *Kajian Administrasi Publik Kontenporer*, h. 98-99.

4. *Responsiveness* : lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat.
5. *Equality* : kesempatan yang sama masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan.
6. *Consensus orientation* : berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
7. *Accountability* : pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang diperbuat.
8. *Efficiency and effectiveness* : sumber daya publik yang dikelola secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
9. *Strategic vision* : penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki visi yang jauh kedepan untuk kepentingan masyarakat.

Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi.¹¹ Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Ciri-ciri *good governance*

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *Good Governance* yaitu.¹²

- a. Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

¹¹Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, h. 6.

¹²Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, h. 13.

B. *Tinjaun Umum Tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa*

1. Pengertian dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD)

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.¹³

2. Dasar Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

Undang-Undang Nmor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia th 2014 nomor 244,tambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomot 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan

¹³Permendes, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Tugas dan fungsi dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Desa mempunyai fungsi.

- a. Perumusan pedoman kebijakan teknis, dibidang Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- b. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan ketata usahaan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

1. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang

berada dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Desa.

C. *Realisasi Penggunaan Dana Desa*

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan,. Namun didalam membiayai kewenangan yang bertanggung jawab adalah desa.¹⁴

Sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka penuntasan masyarakat miskin, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.

Penggunaan dana desa mengacu pada rancangan pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.¹⁵ Sebab itu, prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum didalam pelaksanaan penggunaan dana desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan setelah berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri- menteri dalam negeri dan menteri

¹⁴Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta Selatan: PT Wahana Semesta Indonesia, 2016), h. 88.

¹⁵Hernold Ferry Makawimbang, *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016), h. 16.

teknis atau pimpinan badan pemerintahan non kementerian. Pedoman teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana desa diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Cara Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa.
- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan.
- d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabuten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten.
- e. Kepala bagian Setda akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari Daerah ke rekening Pemerintah Desa.

2. Cara pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa

Tim pelaksana desa akan melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan Desa (RPD) dengan ketentuan:

- a. Permohonan penyaluran tahap I (30%) pada Triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan dan photocopy rekening kas pemerintah desa.

- b. Permohonan penyaluran tahap II (40%) pada Triwulan ketiga dan tahap III pada Triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya.
- c. Tim pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud pada tim pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APDesa (berkas pengajuan RPD) yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDDesa, dikembalikan untuk diperbaiki.
- d. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan) ke bagian Pemerintah Desa guna pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Setda atas dasar pengajuan RPD dari kecamatan, mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten/Kota.
- f. Kepala Bagian Keuangan Setda menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah rekening Pemerintah Desa dimasing-masing Bank yang ditunjuk.
- g. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp6000,- dari Kepala Desa.

3. Penggunaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Desentralisasi keuangan desa yang didalamnya memakai mekanisme ADD yang secara partisipatif melibatkan desa akan mampu membongkar ortodoksi kebijakan bantuan keuangan desa yang sarat dengan makna dominasi dan melestarikan warisan pemerintah Kolonial Belanda. Kekuatan mekanisme ADD terletak pada aspek keadilan dan pemerataan.

Selain itu konsepsi ADD yang memberikan keleluasaan kepada desa, dapat memutus mata rantai dominasi kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa. Tentu tiga aspek tersebut harus menjadi prasyarat dasar dalam menyusun formulasi ADD, karena ketiadaan makna adil, merata dan leluasa akan menjadikan formulasi ADD hanya sebatas jargon politik anggaran. Implikasinya sama dengan mekanisme bantuan keuangan desa, yang tidak bisa menjawab kesenjangan fasilitas pelayanan publik dan sentralisasi pembangunan desa.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Jika diperhatikan dari semua penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah.

1. Musyawarah

Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam Islam, ialah tata aturan Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam ini menegakkan prinsip-prinsip syuraa. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk mengikuti prinsip ini. Nash yang pertama menyuruh rasul bermusyawarah. Dengan demikian para umat lebih patut menerima tugas itu Nash yang kedua menerangkan bahwa sifat para mukmin yang hakiki, ialah melaksanakan sesuatu dengan jalan bermusyawarah.¹⁶ Dalam hal ini musyawarah harus mencapai mufakat sebagai hasil dari berembuk bersama sebagai wujud memahami perbedaan.

Praktek musyawarah dan tukar menukar pendapat pada masa arab pra Islam, sebagaimana terbukti dalam rujuka-rujukan bahasa arab kepada pertemuan-pertemuan berbagai badan ada yang disebut majlis ada pula yang disebut mala, seperti yang juga ditemukan dalam inkripsi-inkripsi kuno di Arabia Selatan. Al-Qur'an banyak menjelaskan sisi penting dari syura ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa islam memandang musyawarah tidak hanya sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan.

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Sebagai hal ini syura hasil dari tradisi dalam Islam sebagai makhluk sosial.¹⁷ Syura dalam hal ini dikenal dengan istilah muyawarah kemudian terus berkembang hingga kini atau lebih dikenal dengan istilah demokrasi.

2. Bergotong royong

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah/5: 2

¹⁶Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*, Juz III(Mesir; Mustafa Al-Halabi,1972), h.226.

¹⁷Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta:Mizan,1995), h. 203.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹⁸

Ayat ini menyatakan bahwa tolong menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain. Begitu juga dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus dilaksanakan dengan gotong royong. hal ini dapat dilihat dengan “Penggunaan dana desa harus diketahui dan di musyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.

Selain itu, seorang dalam memimpin masyarakat agar lebih sejahtera harus memiliki sifat seperti yang diterapkan oleh Rasulullah Saw yaitu;

1. *Shiddiq*

Setiap perkataan maupun tindakan seorang nabi dan rasul adalah benar dan jujur. Yaitu dengan menyampaikan ajaran yang diperoleh dari wahyu Allah kepada

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 142.

umat manusia. Semua yang disampaikan harus benar-benar datang dari Allah Swt.¹⁹

2. *Amanah*

Sifat amanah telah dimiliki oleh Rasulullah sejak kecil bahkan dijuluki oleh masyarakat Al-amin yang artinya dapat dipercaya, kompeten dan konsisten.²⁰

Firman Allah swt QS al-A'raf/7:68:

أَبْلَغُكُمْ ۖ رُسُلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ۖ نَاصِحٌ أَمِينٌ ٦٨

Terjemahnya:

“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.”²¹

3. *Fathanah*

Rasulullah Saw memiliki kecerdasan dalam memahami masalah umat manusia beserta sifat-sifat mereka. Rasulullah Saw juga cerdas dalam menerima tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Rasulullah saw harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk kedalam islam. Beliau juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini untuk memutuskan suatu hal yang terkait kepentingan masyarakat untuk menjalani kehidupan.²²

¹⁹Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” *Skripsi* (Universitas Muhamadiyah Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), h. 2.

²⁰Zulhammi, *Jurnal*, Kepribadian Rasulullah SAW Sebagai Guru Profesional. Jurnal Darul Ilmi, Vol. 2, No. 1, 2014. h. 65

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 213.

²²Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” *Skripsi*), h. 2.

4. *Tablig*

“*Tabligh*” artinya menyampaikan. Lawannya “*Kitman*” artinya menyembunyikan. Ini berarti Rasulullah Saw tidak pernah menyembunyikan pengetahuan dan kebenaran yang diberikan kepada beliau.²³

Firman Allah Swt dalam QS al-Maidah/5/67:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ۖ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۖ﴾²⁴

Terjemahnya:

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”²⁴

Alokasi dana desa dalam hukum Islam diharapkan sebagai solusi agar dana desa (ADD) dapat digunakan sesuai tujuan diadakannya anggaran dana desa sebagai wujud sentralisasi pembangunan yang adil dan merata. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan fundamentalisme dalam hukum Islam sebagai wujud dari syariat Islam. Alokasi Dana Desa (ADD) harus transparan dan sesuai dengan asas kemanfaatan dalam suatu desa untuk masyarakat sebagai wujud pengefektifan realisasi penggunaan dana desa dalam perspektif hukum Islam dalam kasus wilayah Kabupaten Sinjai.

²³Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” *Skripsi*, h. 6.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 158.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan lokasi penelitian*

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*field research*) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai, pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan peneliti dalam judul penelitian.

B. *Pendekatan Penelitian*

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:

1. Yuridis empiris. Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat
2. Yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori dengan konsep-konsep hukum yang relevan dan membangun penelitian ini.

¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 70.

C. Sumber Data

Pada penelitian sumber data berguna untuk mengembangkan hasil penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer merupakan hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.²

Hasil wawancara dengan pengurus/pegawai Dinas (PMD)

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil, observasi buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Antara lain:

1. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴ dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan realisasi penggunaan dana desa (di kantor di kantor DPMD kabupaten sinjai)
2. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan dengan cara berhadapan secara langsung.⁵ Oleh aparat dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD).
3. Dokumentasi adalah suatu proses catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.⁶

²Sutopo HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2006), h. 64.

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106.

⁴Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: alfabeta, 2008) h. 226.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107.

Dokumentasi dalam penelitian ini berguna untuk mengambil gambar selama proses wawancara dan observasi.

4. Studi kepustakaan akan sangat dibutuhkan. Studi kepustakaan dalam hal ini dilakukan terhadap buku yang membahas mengenai peranan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam penelitian ini, di gunakan prosedur penelitian sebagai berikut: kegiatan penelitian di mulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, kemudian surat tersebut di teruskan ke kantor BKPM (Badan koordinasi penanaman modal daerah) lalu di teruskan di kantor Bupati kabupaten sinjai setelah itu di lanjutkan ke kantor DPMD (dinas pemberdayaan masyarakat desa) dan melakukan penelitian di kantor tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang merujuk pada metodologi penelitian. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun instrumen yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri, Pada pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti akan terlibat langsung dalam penelitian ini tanpa diwakili oleh pihak lain. agar peneliti dapat berkonsetrasi untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan proses observasi serta wawancara dengan pihak narasumber.
2. Pedoman wawancara berguna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah disimpulkan.

3. HandPhone, Penggunaan HandPhone pada penelitian ini akan dijadikan peneliti sebagai alat untuk merekam hasil wawancara dengan narasumber, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendengarkan hasil wawancara kembali dengan baik untuk nantinya dilakukan analisis.
4. Laptop/Notebook Penggunaan laptop dalam penelitian digunakan untuk mengolah, dan menyimpan semua hasil wawancara dan analisis dari buku, skripsi dan jurnal yang nantinya digunakan untuk pengembangan hasil penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan yang diperoleh melalui proses wawancara, sehingga data tersebut telah siap digunakan untuk dianalisis. Adapun termasuk dalam tehnik pengolahan yaitu:

- a. Klasifikasi Data berarti mengolah data sehingga menghasilkan informasi. Klasifikasi data ialah mengelompokkan atau mengklasifikasikan data, sehingga dapat melihat laporan sesuai dari masing-masing kelompok.
- b. Reduksi data (*data reduction*) ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstarakan dan transformasi data kasar yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.⁷ Dalam hal ini peneliti memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah analisis peranan Dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa.

⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung:Alfabeta, 2008), h. 247.

c. *Editing* data ialah memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dari badan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dan teliti dalam penelitian. Setelah pengolahan data peneliti kemudian menganalisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk suatu kesimpulan, Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

BAB IV
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM MENGEFEKTIFKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA DESA

A. *Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Kabupaten Sinjai*

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab.Sinjai

Pada awal mulanya Badan Pemberdayaan Masyarakat dibangun pada Tahun 1985 waktu itu nama Instansi tersebut Pembangunan Desa (BANGDES) mulai Tahun 1985 dan Kepala Kantor tersebut bernama MAPPANGILE dan digantikan oleh A. MAKKARONG kemudian digantikan oleh Drs. MUSTAMING TAHIR, M.BA pada tahun 1991 Kemudian Pembangunan Desa (BANGDES) berubah nama menjadi Pembangunan Masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 15 tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sinjai. Kepala Kantor pada saat itu bernama M. PATANG BA dan digantikan oleh Drs. ARSYAD SAWEDI kemudian AMIRUDDIN, BA Setelah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) berubah nama menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (KB-PM) berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Sinjai No. 23 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sinjai . Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 dan yang menjabat sebagai kepala badan yaitu Drs. LUKMAN H. ARSAL, M.Si dan digantikan oleh Muh. HATTA. AP, SH sampai 2010 berdasarkan PERDA Nomor 19 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Dan

Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kab.¹ Sinjai dan selanjutnya Badan KB dan Pemberdayaan Masyarakat berpisah dan berdiri sendiri. Badan KB dan Pemberdayaan Masyarakat berubah nama menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat mulai tahun 2011 di bawah kepemimpinan Drs. H. BASRI RACHMAN dan pada akhir Tahun 2013 Drs. H. BASRI RACHMAN pensiun dari jabatannya kemudian digantikan oleh A. ZAINAL ARIFIN, SIP sebagai pelaksana tugas dan pada Tahun 2013 A. ZAINAL ARIFIN, SIP digantikan oleh Drs. H. ANDI TALHA, M.Si dan menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan kemudian di gantikan oleh A.ZAINAL ARIFIN NUR,. SIP sebagai pelaksana tugas pada Tahun 2017 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.Sinjai

Sesuai amanat UUD 1945 untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan mandiri, salah satu untuk mendukung tercapainya percepatan Pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan telah ditetapkan berbagai kebijakan publik, antara lain Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1957 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran dari PP tersebut telah telah diterbitkan Kepmendagri Nomor 25 Tahun 1968 tentang Balai Penelitian dan Pengembangan Desa (BALITBAGDES), kemudian disempurnakan dengan Kepmendagri Nomor 061/3393/SJ Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penegasan Kembali Pembentukan Kelembagaan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa di Daerah dan kemudian di ubah menjadi Perbub No 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

¹ Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. Sinjai, h. 1.

Visi

- a. Terwujudnya di maksudkan sebagai posisi yang ingin di capai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kemandirian masyarakat. posisi terwujudnya ini terkait dengan kemandirian masyarakat untuk membangun desa.
- b. Kemandirian di maksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan untuk perprakarsa dan berswadaya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah dalam membangun Desa.
- c. Berbasis Potensi Lokal dimaksudkan bahwa kemandirian masyarakat diwujudkan melalui potensi dan kearifan lokal yang dimiliki (nilai, norma, budaya dan potensi lainnya).

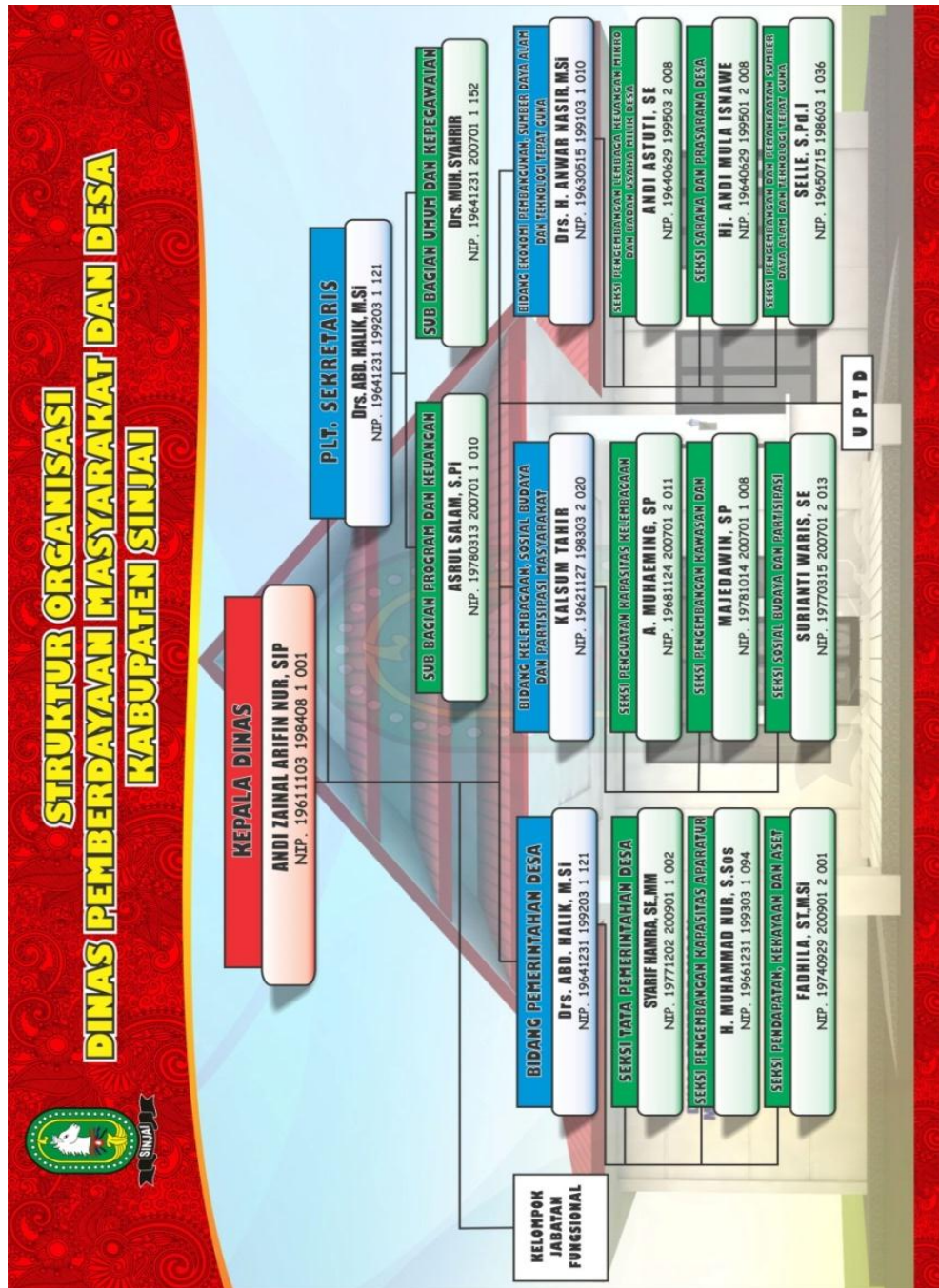
Misi

- a. Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan Sumber Daya Manusia
- b. Mengembangkan Potensi Perekonomian Masyarakat
- c. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat
- d. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan

Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran suatu lembaga yang menggambarkan suatu jabatan dalam suatu instansi. Berikut struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai:



4. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

1. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a. menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi

masyarakat, ekonomi, pembangunan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- g. melaksanakan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris meliputi :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub bagian program dan keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dirinci sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;

- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- h. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Calk) Dinas;
- i. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Sub bagian umum dan kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang pemerintahan desa

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;

- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- c. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan meliputi fasilitasi penataan desa, desa adat dan kelurahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan kapasitas pemerintahan desa, desa adat dan kelurahan, pelaksanaan penyusunan produk hukum desa, pemilihan kepala desa dan desa adat dan desa adat, penyusunan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, evaluasi perkembangan desa/kelurahan, lomba desa, desa adat dan kelurahan, inovasi desa, profil dan data desa dan kelurahan, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja di bidang pemerintahan desa;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Seksi tata pemerintahan desa

Tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Desa;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Desa;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata pemerintahan desa yang meliputi penataan tata wilayah desa, pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status, penetapan, batas desa, desa adat dan kelurahan, pemilihan kepala desa, penetapan pejabat kepala desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa, desa adat dan kelurahan, penamaan desa dan kode desa; penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan, produk hukum desa bidang pemerintahan, produk hukum desa bidang ekonomi dan sosial budaya, manajemen pemerintahan desa dan penataan kewenangan desa, perangkat desa, dan layanan administrasi pemerintahan desa, evaluasi perkembangan desa/kelurahan, lomba desa dan kelurahan, inovasi desa/kelurahan, profil dan data desa/kelurahan, pendampingan desa, sinkronisasi dokumen perencanaan desa, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja tata pemerintahan desa;
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tata pemerintahan desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Seksi pengembangan kapasitas aparatur desa

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan badan permusyawaratan desa, penyusunan standar evaluasi dan pelaporan aparatur desa, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja aparatur desa, pengembangan kapasitas perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat desa, peningkatan peran Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Dusun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas aparatur desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

8. Seksi Pendapatan, kekayaan dan aset desa

Tugas pokok Kepala Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan anggaran, pertanggung jawaban serta verifikasi pelaporan keuangan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan kekayaan desa, transfer dana desa, penataan dan pemanfaatan aset desa, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pendapatan, kekayaan dan aset desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

9. Bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- c. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pelayanan sosial dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan, kerukunan dan ketentraman desa, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja pada bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya Dan Partisipasi Masyarakat;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

10. Seksi penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Tugas pokok Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- d. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kelembagaan masyarakat, pembina, pendamping dan kader pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan lembaga adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja kelembagaan, adat budaya masyarakat;

- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

11. Seksi pengembangan kawasan dan kerjasama desa

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, kerjasama desa dengan BUMD/BUMN dan lembaga lain, kerjasama desa dengan desa lain skala kabupaten, organisasi non pemerintah (NGO) bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja pengembangan kawasan dan kerjasama desa;

- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kawasan dan kerjasama desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

12. Seksi sosial budaya dan partisipasi masyarakat

Tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi penggalian nilai-nilai sosial budaya berdasarkan kearifan lokal, pelaksanaan pengembangan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, penyelenggaraan manajemen pembangunan partisipatif, pengembangan sistem pendataan dan pemanfaatan data sosial budaya masyarakat, penyelenggaraan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat, penyelenggaraan kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan,

bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi sosial budaya dan partisipasi masyarakat;

- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sosial budaya dan partisipasi masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

13. Bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna meliputi :

- a. menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan skala provinsi dengan kebijakan kabupaten di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi desa, tata kelola ekonomi desa, permodalan usaha ekonomi desa, pemasaran dan pengembangan jaringan hasil usaha ekonomi masyarakat, pelembagaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, pelaksanaan usaha ekonomi produktif dan pengembangan kewirausahaan desa, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, Pembangunan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

14. Seksi pengembangan lembaga keuangan mikro dan badan usaha milik desa

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan tata kelola ekonomi desa, pelaksanaan kelembagaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, permodalan dan pemasaran hasil BUMDesa, pengembangan lembaga keuangan mikro, pengembangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Simpan Pinjam yang dikelola Perempuan, pembentukan Lembaga Keuangan Mikro baru, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa;
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

15. Seksi sarana dan prasarana desa

Tugas pokok Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa meliputi:

- a. menyusun pedoman dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Desa;
- c. melakukan melakukan sinkronisasi dan validasi data sarana dan prasarana yang ada di desa dengan stakeholder terkait;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan serta pelatihan, sosialisasi, studi kerja pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sarana dan prasarana desa;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

16. Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pendayagunaan masyarakat di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan, pendayagunaan lingkungan permukiman masyarakat, pemanfaatan dan pengembangan pelestarian potensi sumber daya lokal, pemanfaatan sumber daya energi terbarukan berbasis masyarakat, identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya alam desa, studi kerja pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi pedesaan, pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi identifikasi, pemetaan dan pengkajian potensi sumber daya alam perdesaan dan kebutuhan teknologi tepat guna;

- e. melakukan pembinaan, pengawasan, dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan;
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan regulasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan perangkat daerah maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya berdasarkan regulasi yang ada. Regulasinya ialah peraturan Bupati. Karena sekarang berkembangnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya pemerintah Desa berada di Sekretariat daerah yang sekarang berubah menjadi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, setelah beralih menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa betul-betul melaksanakan tugasnya sambil belajar.²

Selama ini, hanya membina lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPM, Karangtaruna, kemudian di bidang ekonomi, pembangunan dan sumber daya alam yaitu dibidang ekonomi kemasyarakatan seperti BUMDes, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. BUMDes menjadi harapan besar karena pemanfaatan dana besar hanya bias dilontarkan di BUMDes, pernyataan modalnya bisa di manfaatkan di BUMDes. Namun persoalannya sekarang ini BUMDes harus dikelola secara profesional, tidak boleh pengurus BUMDes diangkat begitu saja, harus melalui seleksi. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengawal dan memberikan fasilitas pembimbingan, karena jika tidak dibina dengan modal yang besar seperti ini dapat menjadi masalah dengan temuan-temuan atau jawaban jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan regulasi pemanfaatan dana Desa.³

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

²Abdul Halik (51 Tahun), Sekertaris PLT, Hasil *wawancara* pada tanggal 22 Oktober 2018.di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai.

³Abdul Halik (51 Tahun), Sekertaris PLT, Hasil *wawancara* pada tanggal 22 Oktober 2018. di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai.

1. Perumusan pedoman kebijakan teknis, dibidang Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan ketata usahaan Badan.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka penuntasan masyarakat miskin, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.

Menurut fadhila bahwa:

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah organisasi yang menjadi Pembina perintah Desa dan kelembagaan yang ada di Desa. Sedangkan pemberdayaa masyarakat adalah upaya untuk membantu dan menopang masyarakat agar dapat berdaya dan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki (sumber daya

manusia dan sumber daya alam) sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat mencapai kemandirian nantinya.⁴

Dalam melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, maka diperlukan laporan realisasi penggunaan dana desa. Maka dari itu dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa perlu melakukan upaya dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa. Peraturan Menteri⁵ Keuangan RI nomor 50/pmk 007/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran dan penata usaha pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi transfer ke daerah dan dana Desa telah diatur dalam peraturan menteri keuangan no. 48/pmk07/2016.⁶

Adapun upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa adalah dengan cara taat dengan aturan regulasi dan ketentuan / persyaratan yang telah di atur dan di sepakati bersama. Maka setelah pelaksanaan kegiatan di lakukan penanggungjawab perangkat Desa secepatnya menyeter kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau progres hasil pelaksanaan kegiatan.⁷

Laporan realisasi dan desa harus diperiksa terlebih dahulu sebelum pemerintah desa mengeluarkan dana yaitu dana desa ideology digunakan sesuai peruntukannya dan sesuai prioritas penggunaan dana desa, pembangunan fisik atau kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa harus diperiksa realisasi

⁴ Fadhila (35 tahun) *Seksi Pendapatan, Kekayaan Dan Asset Desa DPMD Kab. Sinjai.* Hasil Wawancara 19 Oktober 2018

⁶ Syarif Hamra (43 tahun) *Kasi Tata Pemerintahan Desa.* Hasil wawancara 24 Oktober 2018, di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai.

⁷ Fadhila (35 tahun) *Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa DPMD Kab. Sinjai.* Hasil wawancara 19 Oktober 2018.

penggunaan anggarannya agar diketahui penggunaanya yang sesuai dengan peruntukannya. Dana desa laporannya tercatat sampai dipusat melalui aplikasi *omspam*, jadi dana desa tidak boleh digunakan sembarangan karena selain terpantau oleh kementrian dan harus dilaporkan realisasi dan serapan dana yang digunakan.⁸

Adapun sanksi yang diberikan apabila perangkat Desa terlambat melaporkan laporan realisasi dana Desa yaitu berupa teguran secara lisan dan tertulis jadi akan dilakukan persuratan dan pelaporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk wilayah Kabupaten Sinjai laporan realisasi penggunaan dana desa sudah berjalan efektif karena dari 67 desa sudah menggunakan SisKeuDes (Sistem Aplikasi Keuangan Desa).⁹

Yang dimna pengembangan Aplikasi sistem desa ini telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perhatian ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI DPR RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi keuangan desa disebut sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoprasikan aplikasi SISKEUDES. Dengan proses pengimputan sekali seusai dengan transaksi yang ada,

⁸Fadhila (35 tahun) *Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa DPMD Kab. Sinjai*. Hasil wawancara 19 Oktober 2018.

⁹Syarif Hamra (43 tahun) *Kasi Tata Pemerintahan Desa*. Hasil wawancara 24 Oktober 2018, di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai.

dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Dokumen penatausahaan
2. Bukti penerimaan
3. Surat permintaan pembayaran (SPP)
4. Surat setoran pajak (SSP)
5. Dokumen-dokumen lainnya
6. Laporan-laporan
7. Laporan penganggaran (perdes, APBDes, RAB, APB Desa per sumber dana)

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Demi terwujudnya pemberdayaan Masyarakat Desa maka yang perlu di perhatikan adalah langkah-langkahnya yaitu:¹⁰

1. Melakukan rapat evaluasi bulanan/tahunan dengan pemerintah Desa (perangkat Desa) terkait progress dari pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.
2. Melakukan pembinaan kepada kelembagaan Desa, baik berbagai teknis, sosialisasi ataupun evaluasi kegiatan.
3. Mengikutkan lembaga Desa atau masyarakat yang punya potensi dalam pelatihan teknis untuk keterampilan dan skill yang dimiliki.

dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa diantaranya: Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa

¹⁰Syarif Hamra (43 tahun) *Kasi Tata Pemerintahan Desa*. Hasil wawancara 24 Oktober 2018, di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai.

dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya.

Penggunaan dana desa mengacu pada rancangan pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.¹¹ Sebab itu, prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum didalam pelaksanaan penggunaan dana desa.

Adapun faktor pendukung dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa maka digunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Yang dimana tahap kedua menggunakan aplikasi *Omspam*. *Omspam* adalah memantau pengelolaan dana desa tiap pemerintah daerah yang dimana aplikasi tersebut untuk menginput data, mencetak dan mengupload dokumen persyaratan penyaluran sekaligus monitoring data dana desa.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi

1. Keterlambatan Desa dalam menetapkan APBDes karena harus menunggu regulasi yang baru lagi.
2. Faktor cuaca menjadi kendala
3. Permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa.

¹¹Hernold Ferry Makawimbang, *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016), h. 16.

Tujuan utama dari laporan realisasi dana desa adalah untuk memaksimalkan laporan penggunaan dana desa pada setiap tahapannya. Sesuai dengan peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun anggaran 2018 pada pasal 9 yaitu:

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
2. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
3. Penyaluran dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ke 3 bulan januari setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa dari kepala Desa; dan
 - b. Dihapus.
4. Penyaluran dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu ke empat bulan juni setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala Desa.
- 4a. penyaluran dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan juli, setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala Desa.

5. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen).
6. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
7. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
8. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pada tahun 2018 pada pelaksanaan pekerjaan / kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa harus dimaksimalkan dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang sesuai peraturan penggunaan dana desa (DDS), Oleh karena itu pemerintah desa harus taat terhadap penggunaan pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dananya, Dan melaporkan realisasi pertahapan yang telah dilaksanakan. (realisasi dan serapan dana desa yang telah digunakan).

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah Pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Namun dalam poin ini lebih menerangkan tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa.

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat islam demi kelangsungan sejarah umat islam.¹²

Dalam kajian tatanegara islam dikenal istilah *ahl al-hall wa al-aqd* yang artinya “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat” atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat. istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutkan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, iman, Kepala Negara secara langsung. Karena itu *ahl al-hall wa al-aqd* juga disebut oleh Imam Al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peran

¹²Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 260.

golongan ini penting untuk memilih salah seorang diantara *ahl alimamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.¹³

Bertolak dari uraian diatas dapat dikatakan *ahl al-hall wa al-aqad* merupakan suatu lembaga pemilihan. Orang-orang berkududukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala Negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifa dalam pemikiran ulama fiqih, dan kecendrungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Daerah dan sampai unit pemerintahan terendah di Indonesia yaitu di tingkat desa dikenal adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan adanya undang-undang ini maka adanya pula payung hukum yang melindungi kinerja DPMD dalam mengawasi Pemerintahan Desa. Dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah biasanya taklupa DPMD melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh atau perwakilan masyarakat desa, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65. Adapun pandangan ajaran Islam yaitu Musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umatnya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan dengan cara musyawarah.

Selain itu, seorang dalam memimpin masyarakat agar lebih sejahtera harus memiliki sifat seperti yang diterapkan oleh Rasulullah Saw yaitu;

¹³Muhammad Tahir Azhariy, *Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Madina dan Masa kini* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 112.

1. Shiddiq

Setiap perkataan maupun tindakan seorang nabi dan rasul adalah benar dan jujur. Yaitu dengan menyampaikan ajaran yang diperoleh dari wahyu Allah kepada umat manusia. Semua yang disampaikan harus benar-benar datang dari Allah Swt.¹⁴ Siddiq jika di kaitkan dengan hasil penelitian agar terwujud peranan Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana Desa di tinjau dari hukum Islam di kantor DPMD kabupaten sinjai maka, siddiq menjadi acuan agar realisasi dari pemberdayaan masyarakat Desa berupa langkah-langkah seperti melakukan rapat evaluasi bulan/tahun dengan pemerintah Desa (perangkat Desa) terkait progres dari pendanaan yang di lakukan oleh pemerintah Desa benar-benar terwujud maka pemberdayaan masyarakat desa sangat efektif sesuai tujuan adanya lembaga DPMD.

Siddiq jika di terapkan dalam pengelolaan dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat maka hasil dari pendapatan asli desa akan diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga apa yang di cita-citakan dari wujud sebuah pemberdayaan masyarakat akan terwujud, dan hal ini sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh Islam sebagai wujud pedoman dari tatanan kehidupan dan bernegara, sebagai mana yang pernah di terapkan pada masa kerasulan. Siddiq jika di terapkan dalam tatanan kehidupan maka proses kehidupan berbangsa dan bernegara akan mengutamakan kemaslahatan masyarakat sehingga pemberdayaan akan menjadi hal yang terlaksana di setiap daerah, termasuk di kantor DPMD kabupaten sinjai.

¹⁴Muhammad Iqbal Arrosyad, "Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi." *Skripsi* (Universitas Muhamadiyah Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), h. 2.

2. Amanah

Sifat amanah telah dimiliki oleh Rasulullah sejak kecil bahkan dijuluki oleh masyarakat Al-amin yang artinya dapat dipercaya, kompeten dan konsisten.¹⁵

Amanah merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam wujud suatu kehidupan, baik perkara personal, instansi, hingga bangsa dan negara. Amanah merupakan fondasi agar peranan Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana Desa (DPMD) kabupaten sinjai dapat terwujud. Penggunaan dana Desa haruslah di topang dengan sifat amanah, karena sebagaimana yang di ketahui bersama dana Desa merupakan hal yang paling sensitif dalam pengelolannya.

Pemerintah Desa harus taat terhadap penggunaan pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana Desa, dan melaporkan realisasi pertahapan yang telah di laksanakan atau realisasi dan serapan dana Desa yang telah di gunakan, haruslah amanah agar dana Desa sebagai wujud terealisasinya pemberdayaan masyarakat dan sesuai fungsi yang akan membawa kemaslahatan terhadap masyarakat. Sehingga pelaporan dana desa juga harus di penuhi sikap amanah agar untuk memaksimalkan laporan pnggunaan dana desa pada setiap tahapanya dan dapat di gunakan sesuai fungsi anggaran dana desa. Amanah haruslah di jalankan di setiap lini kehidupan baik instansi ataupun yang menjalankan instansi tersebut, tidak hanya pada kantor DPMD kabupaten sinjai, tetapi di setiap lembaga dalam menopang kehidupan bernegara.

3. Fathanah

¹⁵Zulhammi, *Jurnal* ,Kepribadian Rasulullah SAW Sebagai Guru Profesional. Jurnal Darul Ilmi, Vol. 2, No. 1, 2014. h. 65.

Rasulullah Saw memiliki kecerdasan dalam memahami masalah umat manusia beserta sifat-sifat mereka. Rasulullah Saw juga cerdas dalam menerima tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Rasulullah Saw harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk kedalam islam. Beliau juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini untuk memutuskan suatu hal yang terkait kepentingan masyarakat untuk menjalani kehidupan.¹⁶

Fathanah dalam mengelolah realisasi penggunaan dana desa di kantor DPMD kabupaten sinjai haruslah di lakukan oleh orang yang memiliki kapabilitas atau dalam hal ini harus cerdas atau fathanah, karena jika realisasi penggunaan dana desa di kantor DPMD dikelolah oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas atau yang tidak cerdas “fathanah” maka hal-hal seperti menyalahi aturan atau disfungsi dana desa dapat terjadi.

Salah satu yg menjadi faktor penghambat pengelolaan dana desa yang tidak sesuai adalah permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa, sehingga jika yang mengelolah (SDM) adalah orang yang fathanah maka DPMD akan mudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dana desa haruslah dijalankan oleh perangkat desa hingga SDM yang di dasari sikap fathanah agar terwujud pemberdayaan yang sesuai fungsi dana desa untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten sinjai.

4. Tablig

¹⁶Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” *Skripsi*), h. 2.

“Tabligh” artinya menyampaikan. Lawannya “Kitman” artinya menyembunyikan. Ini berarti Rasulullah Saw tidak pernah menyembunyikan pengetahuan dan kebenaran yang diberikan kepada beliau. Tabliq dalam menelaah apa yang telah dilakukan oleh DPMD sesuai hasil penelitian maka peranan dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa di kabupten sinjai sudah sesuai dengan pemaknaan tabliq. Hal ini didasari dengan laporan realisasi penggunaan dana desa sudah sesuai dengan tujuan dana desa tersebut.

Tabliq telah diterapkan dalam laporan realisasi dana desa karena telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa berupa pengambilan keputusan mengenai masalah biasanya DPMD melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh atau perwakilan masyarakat desa sehingga sikap tabliq atau menyampaikan sebagaimana mestinya dapat dilakukan antara pemerintah, instansi, dan masyarakat, dengan wujud sinkronisasi dalam penyaluran dana desa yang sesuai dalam koridor berbangsa dengan ditopang oleh ahlakul qarimah yang telah ditetapkan dalam Islam, permasalahan yang dihadapi oleh DPMD kabupaten sinjai jika menerapkan sikap *siddiq*, *amanah*, *fathanah* dan *tabliq* maka sekiranya permasalahan peranan dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa di kantor DPMD kabupaten sinjai dapat menjadi hal yang mudah diatasi. Sehingga, ahlak yang telah diatur dalam koridor Islam merupakan hal yang harus dijalankan demi menopang tatanan kehidupan yang semakin ruwet namun tetap Islami, terlebih jika dikaitkan dengan konsep berbangsa dan bernegara maka agama

haruslah jadi acuan utama agar tetap pada fungsi mengutamakan kemaslahatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah memberika regulasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan perangkat daerah maupun Dinas Pemberdayaan Msyarakat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya berdasarkan regulasi yang ada. Regulasinya ialah peraturan Bupati. Karena sekarang berkembangnya organisasi perangkat daerah yang sebelumnya pemerintah Desa berada di Sekretariat daerah yang sekarang berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, setelah beralih menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa betul-betul melaksanakan tugasnya sambil belajar.
2. Adapun faktor pendukung dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa maka digunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Yang dimana tahap kedua menggunakan aplikasi *Omspam*. *Omspam* adalah memantau pengelolaan dana desa tiap pemerintah daerah yang dimana aplikasi tersebut untuk menginput data, mencetak dan mengupload dokumen persyaratan penyaluran sekaligus monitoring data dana desa.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi

- a. Keterlambatan Desa dalam menetapkan APBDes karena harus menunggu regulasi yang baru lagi.
- b. Faktor cuaca menjadi kendala
- c. Permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa.

3. Adapun pandangan ajaran Islam yaitu Musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umatnya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan dengan cara musyawarah.

Selain itu, seorang dalam memimpin masyarakat agar lebih sejahtera harus memiliki sifat seperti yang diterapkan oleh Rasulullah Saw yaitu;

1. *Shiddiq*

Setiap perkataan maupun tindakan seorang nabi dan rasul adalah benar dan jujur.

2. *Amanah*

Sifat *amanah* telah dimiliki oleh Rasulullah sejak kecil bahkan dijuluki oleh masyarakat Al-amin yang artinya dapat dipercaya, kompeten dan konsisten.

3. *Fathanah*

Rasulullah Saw memiliki kecerdasan dalam memahami masalah umat manusia beserta sifat-sifat mereka. Rasulullah Saw juga cerdas dalam menerima tugas dan amanah yang diberikan kepadanya

4. *Tablig*

“*Tabligh*” artinya menyampaikan. Lawannya “*Kitman*” artinya menyembunyikan. Ini berarti Rasulullah Saw tidak pernah menyembunyikan pengetahuan dan kebenaran yang diberikan kepada beliau.

Implikasi penelitian

1. agar Lebih meningkatkan hubungan kerja sama antara DPMD dan pemerintah Desa, dan diharapkan terealisasi pembangunan dana desa yang adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.Daim. *Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Akbar, Muh Nur. *Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bulukumba*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmupolitik, Univeritas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Arrosyad, Muhammad Iqbal. *Skripsi "Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi."* Universitas Muhamadiyah Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015.
- Azhariy, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam. Implementasinya pada Priode Madina dan Masa kini*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Banga, Wempy. *Kajian Administrasi Publik Kontenporer*. Kendari: Unhalu Press, 2011.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pmerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Hetifa Sj, Sumarto. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lapananda, Yusran. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta Selatan: PT Wahana Semesta Indonesia, 2016.
- Liando, Leonardo Lisua. *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta:Mizan,1995.
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016.
- Marzuki, *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*. Universitas Yogyakarta.
- Nuryanto, Daim A. *Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Setiawan, Dedy. *Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2013-2014*, Department of Public Administration FISIP University of Riau.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitaif dan kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung:Alfabeta, 2008.
- Sutopo HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2006.
- Widodo, Joko. *Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas,control birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Surabaya: Insan cendekia, 2001.
- Zakariyya, Abu Husayn Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Muqayis al-Lughah, Juz III*. Mesir; Mustafa Al-Halabi,1972.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Narasumber:

Abdul Halik (51 Tahun), Sekertaris PLT, Hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober 2018, .di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai.

Fadhila (35 tahun) Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa DPMD Kab. Sinjai. Hasil wawancara 19 Oktober 2018.

Syarif Hamra (43 tahun) *Kasi Tata Pemerintahan Desa*. Hasil wawancara 24 Oktober 2018, .di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai.

Internet :

<https://www.suryaden.com-pp-43-Tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-desa>.

Sutardjo. *Aturan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018*, 03 Januari 2018. <http://pendampingdesa.or.id/aturan-pengelolaan-dana-desa-tahun-2018/>. (diakses pada tanggal 5 Agustus 2018).

Permendes. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa

Zulhammi. *Jurnal* ,Kepribadian Rasulullah SAW Sebagai Guru Profesional. Jurnal Darul Ilmi. Vol. 2, No. 1, 2014.

LAMPIRAN



Gambar 1.0 Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.Sinjai



Gambar 1.1 Wawancara dengan kepala DPMD kab. Sinjai.



Gambar 1.2 Wawancara dengan kasi tata pemerintahan desa Kab.Sinjai,



Gambar 1.3 wawancara dengan seksi pendapatan kekayaan dan aset desa DPMD.



Gambaar 1.4 Wawancara Dengan Sekertaris PLT DPMD Kab.Sinjai.

Kepada Yth.
Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syariah dan Hukum
Di
Samata-Gowa

Buat surat no ②
fr 2/2-2018

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang betanda tangan di bawah ini

Nama : A. Irham Maulana Asis
Nim : 10200114026
Semester : VII (Tujuh) HPK A
Angkatan : 2014

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut:

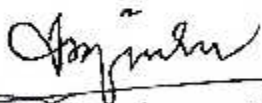
1. Prioritas Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Pasal 7 Peraturan Desa Kaloling No. 22 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Kaloling Kab. Sinjai). *judul sudah ada*
2. Analisis Peranan Sekretaris Daerah Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kab. Sinjai).
3. Peraturan Pemerintah Desa dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balangpesoang Kab. Bulukumba).
4. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Rappocini) kasus 2017. *sudah ada di Google*

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

27 Februari 2018

Mengetahui
Penasehat Akademik


Abdulrahman Kanang, M.pd, Ph.D

pemohon


A. Irham Maulana Asis

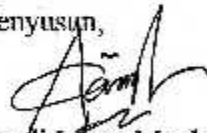
PENGESAHAN DRAFT PROPOSAL

Nomor: /HPK/2018

**Judul Skripsi : Analisis Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam
Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau
Dari Hukum Islam (Studi di Kantor BPMD Kabuapten Sinjai)**

Gowa, 10 , Oktober 2018

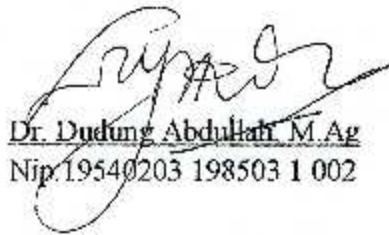
Penyusun,



Andi Ibrahim Maulana Asis

Nim. 10200114026

Pembimbing I



Dr. Dudung Abdullah M.Ag

Nip.19540203 198503 1 002

Pembimbing II




Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D

Nip.19731231 200501 1 034

Diketahui Oleh :

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan




Dra Nila Sastrawati, M.si

Nip.19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

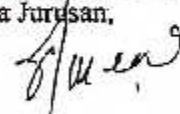
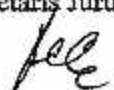
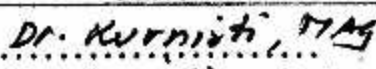

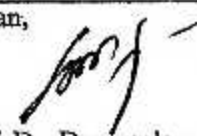
Nip.19621016 1990031 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa
Tlp. (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
JURUSAN: HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN

Nama : Andi Irham Maulana Azis
NIM : 10200114026

JUDUL SKRIPSI	HARI/ TANGGAL	MENYETUJUI DEKAN/KAJUR/SEKJUR
Analisis Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Wilayah Kabupaten Sinjai)	Jumat, 2 Maret 2018	Ketua Jurusan,  Dra. Nilda Sastrawati, M. Si
PEMBIMBING		
1. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag 2. Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D	Senin, 24 September 2018	Sekretaris Jurusan,  Dr. Kurniati, M. Hi
PENGUJI		
1.  2. 		Dekan,  Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Hari/ Tanggal Ujian Proposal: SELASA / 9 OKT 2018

Hari/ Tanggal Ujian Hasil :

- Dibuatkan dan diarsipkan Surat Keputusan Pembimbing di Jurusan
- Dibuatkan Surat Keputusan Penguji di Bagian Akademik Fakultas
- Jadwal ujian proposal/ hasil dijadwalkan Pengelola Jurusan


FORMULIR
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Nama : Andi Irham Maulana Anis
2. NIM : 10200114026
3. Judul Skripsi : Analisis Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Pengguguran Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Wilayah Kabupaten Singai.
4. Rencana Seminar Proposal
- a. Hari/Tanggal : Selasa . 09 . 10 . 2018 .
- b. Waktu : 09 . 00 - 10 . 00
- c. Tempat : Ruang Jurusan Hko .

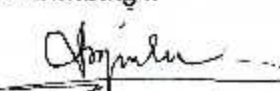
Samata,

2018

Pembimbing I

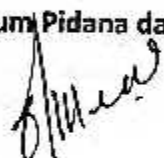

..Dr. Dukung Abdullah M. Ag
NIP. 19540203 198503 1 002

Pembimbing II


..Abd. Rahman Karang M. Pd., Ph.D
NIP. 1973 1231 2005011039

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan


Dra. Nila Sastrawati, M. Si
NIP. 19710712 199703 2 002

*1. Bagi Mahasiswa yang akan seminar proposal, harus menyerahkan formulir ini 3 hari kerja sebelum hari seminar.

PERSETUJUAN PEMBIMBING/ PENGUJI

Pembimbing dan penguji penyusun skripsi saudara **A.IRHAM MAULANA** ASIS, NIM: 10200114026, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kab. Sinjai)*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasyah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

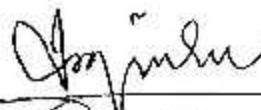
Samata November 2018

Pembimbing I



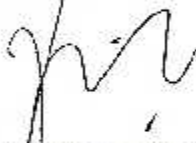
Dr. Dodung Abdullah, M.Ag.
NIP. 195407031985031002

Pembimbing II



Abd. Rahman Kanaang, M.Pd., Ph.D.
NIP. 197312312005011034

Penguji I



Dr. Kurniati, M.H.I.
NIP. 197406272006042002

Penguji II



Hj. Rahmianti, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199710052009012005



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Lingkungan Tanassang, Kec. Sinjai Utara Kode Pos 92615

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/14.372 /DPMD

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alamat : Lingkungan Tanassang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : A. IRHAM MAULANA ASIS
Tempat/Tanggal Lahir : Bonto Bulaeng, 1 April 1995
Nama perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
No induk Mahasiswa : 10.200.11.4026
Program Studi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Buhung Tellang, Desa Balangpesoang, Kecamatan
Bulukumpa, Kab. Bulukumba

Telah selesai melakukan penelitian Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, terhitung mulai tanggal 3 Oktober s/d 13 November 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "ANALISIS PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENGEFECTIFKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sinjai, 25 Oktober 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab. Sinjai



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Persatuan Raya Nomor 115 Telp./Fax. (0482) 22450 Kab. Sinjai 92611

Sinjai, 18 Oktober 2018

Momor : 3150/21/01/UPM-PTSP/X/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab. Sinjai

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Selatan, Nomor : 7032/S.01/PTSP/2018, Tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI IRHAM MAULANA ASIS
Tempat/Tanggal Lahir : Bonto Bulaeng, 01 April 1995
Nama Lembaga/Perguruan tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
NIM : 10200114026
Program Studi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Buhung Tellang Desa Balang Pesoang
Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Disetasi dengan Judul : **ANALISIS PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGEFEKTIFKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI TINJAU HUKUM ISLAM (STUDI DI KANTOR BPMD KABUPATEN SINJAI)**.

Yang akan di laksanakan dari : Tgl. 03 Oktober s/d 13 November 2018
Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

Demikian izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,


ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19750105 199311 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Sinjai (sebagai laporan);
2. Kepala Kejaksaan dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Bersangkutan Ser/Andi Irham Maulana Asis;
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa Gowa
Telp. (0411) 424335 Fax. 424336

Nomor : B-5145 /SH.01/PP.00.9/10/2018

Samata, 07 Oktober 2018

Lamp : 1 (Satu) Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

**Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel
di
Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andi Irham Maulana Asis
Nim : 10200114026
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Perumahan Bumi Samata Permai Kab. Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**"Analisis Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Perspektif Hukum
Islam (Studi Wilayah Kabupaten Sinjai)"**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
2. Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Kantor Badan P terhitung mulai tanggal 3 September s/d 28 September 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam
No. Dekan
Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19821016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

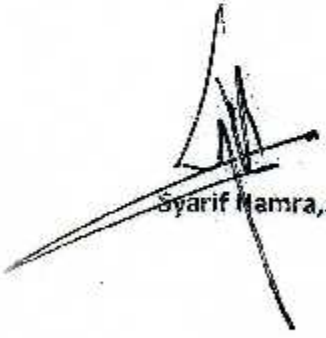
Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:

4. Nama Peneliti : A. Irham Maulana Asis
Profesi : Mahasiswa
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan/Syariah dan Hukum
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Prumahan bumi sanata permai
5. Nama Informan : Syarif Hamra, SE,MM
6. Profesi : Kasi Tata Pemerintahan Desa
Lembaga/Kantor : Kantor DPMD
Alamat : Jl.Baso Kalaka Kab.Sinjai

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 3 Oktober s/d 13 November 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.


Sinjai, 24 Oktober 2018

Informan



Syarif Hamra, SE, MM

Peneliti



A. Irham Maulana Asis
NIM. 10200114026

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Peneliti : A. Irham Maulana Asis
Profesi : Mahasiswa
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan/Syariah dan Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Perum Bumi Samata Permai
2. Nama Informan : Drs. Abd Halik, M.Si
Profesi : PNS
Lembaga/Kantor : Dinas PMD Kab. Sinjai
Alamat : Jl. Mawar No. 3 A Balangnipa


Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal Oktober s/d November 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Sinjai, 22 Oktober 2018

Informan


Drs. Abd Halik, M.Si

Peneliti


A. Irham Maulana Asis
NIM. 10200114026

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

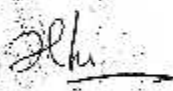
Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama Peneliti | : A. Irham Maulana Asis |
| Profesi | : Mahasiswa |
| Jurusan/Fakultas | : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan/Syariah dan Hukum |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Alamat | : Prumahan bumi samata permai |
| 2. Nama Informan | : Fadhila, ST, Msi |
| 3. Profesi | : Seksi pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa DPMD kab. Sinjai |
| Lembaga/Kantor | : Kantor DPMD |
| Alamat | : jl. persatuan raya kab. sinjai |


Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 30 Oktober s/d 13 November 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Sinjai, 19 Oktober 2018

Informan


Fadhila, ST, Msi

Peneliti


A. Irham Maulana asis
NIM. 10200114026

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : **A. irham maulana asis** lahir di Bontobulaeng 01 April 1995, anak ke dua dari empat bersaudara dan merupakan buah cinta dari pasangan Andi abd asis Andi fatimasanti, Jenjang pendidikan penulis di mulai dari **SDN. 240 Harue** pada tahun 2001 tamat pada tahun 2008, setelah tamat sd penulis melanjutkan pendidikan di **SMPN 1 Bulukumpa** dan selesai pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di **SMA NEGERI 2 Bulukumba** dan tamat pada tahun 2014.

Pasca selesai di sekolah menengah atas penulis langsung melanjutkan pendidikan di **Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** dengan mengambil jurusan **Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan** setelah lama bergelut dalam dunia kampus penulis pernah mengikuti beberapa organisasi baik itu intra maupun ekstra seperti di Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Himpunan Mahasiswa islam.